

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin marak dibicarakan karena terdapat banyak kasus mengenai buruknya kualitas suatu laporan keuangan itu sendiri tidak terkecuali pada laporan keuangan pemerintah daerah, terbukti dengan banyaknya penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada publik atau masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus berkualitas. Laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Badan Pengawasan Keuangan).

Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara baik dan wajar. Sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak memberi opini (BPK,2016).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi beberapa karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

Tabel 1.1
Daftar Opini Audit BPK

Tahun	Opini BPK
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPKP RI (2018)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 setelah selama 4 (empat) tahun berturut-turut yakni tahun 2013-2016 Provinsi DKI Jakarta hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah lemahnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada program aplikasi berbasis akrual, sehingga tidak sesuai dengan batas waktu penerapan yang telah ditetapkan, dan belum sesuai konsep serta kerangka dari indikatornya. Selain Standar Akuntansi Pemerintahan, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menjadi

penunjang keberhasilan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dimasa yang akan datang.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi akuntansi berbasis akrual di seluruh entitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemahaman akan SAP sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Ranny Hanaffy (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Pati. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti Sistem Pengendalian Internal (SPI) pemerintah daerah yang dinilai masih lemah. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) masalah dalam temuan BPK disebabkan lemahnya

SPI. Diperlukan terobosan dalam SPI agar satuan-satuan kerja (satker) pada pemerintah daerah benar-benar bekerja dengan cara memberikan konsultasi dan pembinaan dalam setiap transaksi keuangan.

Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang di kutip dari situs www.pikiran-rakyat.com yang bertajuk “BPK Soroti SPI yang Semrawut”. SPI yang ideal seharusnya berfungsi membina, mengawasi dan segera mengingatkan pemerintah jika ada kemungkinan pelanggaran, korupsi atau resiko dalam transaksi yang dilakukan pemerintah. Beliau juga mengingatkan agar APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) diisi dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tut Madiguna Agung dan Gayatri (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan pada Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain Sistem Pengendalian Intern untuk mengoptimalkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, saat ini digunakan alat bantu teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang

disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu, Nyoman Trisna dan I Gusti Ayu Purnamawati (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Jembrana. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Islam memiliki definisi yang hampir sama dengan Standar Akuntansi pada umumnya. Standar Akuntansi adalah peraturan umum

yang dijabarkan dari laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi. Sedangkan didalam Standar Akuntansi Islam lebih mengutamakan kearah pola pertanggungjawaban yang menuju pola keadilan dan kebenaran antar sesama sesuai dengan syariat Islam. (R. Ait Novatiani, 2011).

Pengendalian atau pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan dan memperbaiki yang salah serta mengembalikan ke jalan yang benar. Pengendalian atau pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap hal yang dilakukan. Untuk mendukung pengawasan agar berjalan dengan baik, maka setiap elemen yang terkait didalam pemerintahan memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT dan penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan Syariah. Dengan demikian pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2006).

Dalam pandangan Islam, Sistem informasi digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT (QS. Ar-Ra'd [13] : 11). Dan Laporan keuangan dalam islam disusun hendaknya meliputi, laporan laba/rugi, laba ditahan, Neraca, sumber dan penggunaan dana, juga laporan khusus mengenai dana zakat. Adapun tujuan khusus laporan keuangan itu adalah menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi baik itu posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan lainnya. Sebagai suatu proses pencatatan yang akan menyajikan informasi keuangan, akuntansi

harus dapat mengungkapkan kebenaran sesuai bukti-bukti yang sah baik secara akuntansi maupun Islam. Dalam surat Al Baqarah ayat : 282

Dari pembahasan diatas penulis memilih untuk melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan setelah 4 tahun berturut-turut yakni tahun 2013-2016 hanya mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Penulis ingin mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern menjadi faktor yang berpengaruh dalam meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMENFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM” (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

- b. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
- d. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari masalah-masalah yang dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- d. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas YARSI.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai variabel dependennya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.